

LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
BADAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2013



BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKP Tahun 2013 disusun sesuai dengan Permenpan dan RB No.29 Tahun 2010 dan Permentan No.135 tahun 2013, bahwa setiap unit kerja wajib melaporkan hasil kinerja program, kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Menteri Pertanian.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan : (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memantapkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam kegiatan berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP).

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2013, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKP Tahun 2013. Indikator sasaran yang ditargetkan

sebagian telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu stabilnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya dan stabilnya harga beras di tingkat konsumen. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 yang telah dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapang, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Februari 2014

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar grafik.....	vi
Daftar lampiran.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>5</b>
A. Perencanaan Kinerja.....	5
B. Penetapan Kinerja.....	12
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
A. Hasil Pengukuran Kinerja.....	14
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013.....	15
C. Akuntabilitas Keuangan.....	36
D. Dukungan Instansi Lain.....	39
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. Tinjauan Umum.....	42
B. Hambatan dan Kendala.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel	1. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 .....	13
Tabel	2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013.....	15
Tabel	3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Tahun 2009 - 2013.....	16
Tabel	4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2009 – 2013.....	17
Tabel	5. Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2009 - 2013.....	19
Tabel	6. Perkembangan Dana dan RTM Desa Mapan di Indonesia, Tahun 2006-2012.....	20
Tabel	7. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein Serta Nilai PPH Tahun 2009 – 2013.....	21
Tabel	8. Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2011 - 2013.....	22
Tabel	9. Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional Secara Kuantitas Tahun 2011 - 2013.....	25
Tabel	10. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2013.....	28
Tabel	11. Capaian Indikator <i>Coefisient Variant (CV)</i> Tahun 2009-2013.....	29
Tabel	12. Perkembangan Pelaksanaan Penguatan LDPM Periode Periode 2009-2013.....	30
Tabel	13. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2009-2013.....	32

Tabel	14.	Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan LPM Per Provinsi Tahun 2013.....	33
Tabel	15.	Provinsi yang Tidak Realisasi Bansos Penuh dan Permasalahannya.....	34
Tabel	16.	Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup BKP Pada Tahun Anggaran 2009 dan 2013.....	37
Tabel	17.	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2013.....	37
Tabel	18.	Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah Per Jenis Belanja pada TA.2013.....	38
Tabel	19.	Matriks Dukungan Instansi yang Diharapkan.....	39

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	1. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani dan GKG di Tingkat Penggilingan Tahun 2009-2013.....	28
Grafik	2. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani dan Beras Eceran Tahun 2009-2013.....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target dan Kebutuhan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan	
Tahun 2010-2014.....	46
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Ketahanan Pangan	
Tahun 2013.....	47
Lampiran 3. Penetapan Kinerja (PK) Badan Ketahanan Pangan 2013.....	48
Lampiran 4. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan.....	49



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai *“kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau”* dan ketahanan pangan merupakan *tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat*. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam;

serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP). Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2013, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKP Tahun 2013.

### **A.1. Landasan Hukum**

Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian, ditetapkan dalam : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dalam peraturan tersebut tugas Badan Ketahanan Pangan yaitu: *"Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan"*. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, BKP juga secara *ex-officio* bertugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada :

- a) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan;
- b) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d) Peraturan Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013.

## **A.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi kementerian.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : (1) Mengetahui sejauhmana kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2013; dan (2) Memenuhi kewajiban Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2013 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LAKIP Kementerian Pertanian.

## **A.3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2013**

Sistematika penyusunan LAKIP berdasarkan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 tahun 2010 yaitu tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yaitu: *"Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan"*. Dalam melaksanakan tugasnya, BKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
2. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
3. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
4. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; serta
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang berperan dalam pembangunan ketahanan pangan, maka sangat diperlukan kerjasama yang sinergis

dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), menetapkan BKP secara *ex-officio* sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian.

BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Presiden RI untuk : (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Tugas BKP meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, BKP didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi, yaitu:

1. *Sekretariat Badan*, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.
2. *Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan*, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
3. *Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan*, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan.
4. *Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan*, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN KINERJA

##### Rencana Strategik

Mengingat pada tahun 2012 dan 2013 telah terjadi beberapa perubahan kebijakan, target dan sasaran pembangunan pertanian, maka Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan perubahan Renstra yang disesuaikan dengan Permentan No. 83.1/Permentan/RC.110/12/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014, termasuk perubahan arah kebijakan dan strategis dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan sesuai surat addendum nomor 321/RC.120/K/06/2013. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2013, Badan Ketahanan Pangan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Visi

Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, maka Visi BKP Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 **"menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan"**. **Handal** berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. **Aspiratif** berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. **Inovatif** berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. **Pemantapan Ketahanan Pangan** adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

##### 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun Misi BKP Kementerian Pertanian dalam tahun 2010-2014 sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
- b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
- c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

### **3. Tujuan**

Seiring visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan peluang, tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014 adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
- b. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
- c. Mengembangkan sistem distribusi, harga, dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
- d. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita; dan
- e. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

### **4. Sasaran Strategis**

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan, sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 - 2014 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;

- b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
- c. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
- d. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
- e. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.
- g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- h. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

## **5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2013 tersebut, ditempuh melalui strategi, kebijakan, program, kegiatan yang masih mengacu pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

### **5.1. Strategi**

Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu :

- a. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
- b. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
- c. Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;

- d. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
- e. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
- f. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Implementasi dari Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, dilaksanakan melalui :

- a. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan;
- b. Pemantapan sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan;
- c. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- d. Penajaman keamanan pangan segar; dan
- e. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui : (a) Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); (b) Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah; (c) Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (d) Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan; dan (e) Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.
- b. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : (a) Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; (b) Mengembangkan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung; dan (c) Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan serta daya beli masyarakat.



- c. Percepatan penganekaragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui : (a) Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; (c) Menumbuhkan dan mengembangkan industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); (d) Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan (e) Pengawasan keamanan pangan segar.
- d. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui : (a) Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor; (b) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; (c) Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; (d) Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (e) Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan; dan (f) Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk menopang berbagai strategi tersebut, diperlukan strategi penunjang yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi BKP, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, peduli, transparan, dan bebas KKN.
- b. Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan.
- c. Merumuskan produk hukum bidang ketahanan pangan yg berpihak kepada petani.
- d. Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif.
- e. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.

## **5.2. Kebijakan**

Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang bersifat umum dan strategis tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan BKP, tetapi menyebar di berbagai subsektor lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya.

Beberapa kebijakan yang berada dalam kewenangan dan penanganan dari BKP antara lain:

- a. Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, diarahkan untuk: (i) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (ii) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- b. Peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakannya diarahkan untuk : (i) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (ii) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (iv) Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, antara lain: (i) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (ii) Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; (iii) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar; dan (iv) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (ii) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (iii) Meningkatkan peranan kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerja sama internasional; (iii) Peningkatan

pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

## 6. Program

Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2013, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mengacu pada program pembangunan tahun 2010-2014 yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Adapun indikator sasaran program (outcome) yaitu: (1) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun; (2) Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan dengan pencapaian skor PPH menjadi 93,3 untuk tahun 2014; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5 persen; serta (4) Pengembangan lembaga distribusi masyarakat pada tahun 2014 menjadi 1.750 gapoktan, 2.000 lumbung dan 17 cadangan pangan pemerintah (propinsi) untuk menjaga kestabilan pangan pokok.

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

- a. **Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.
- b. **Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan**, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan.
- c. **Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar**, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.
- d. **Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan**, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.

## **7. Rencana Kinerja Tahun 2013**

Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2013 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja. Sasaran Kinerja Tahun 2013 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, dengan indikator kerjanya sebagai berikut :

- a. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan per tahun sebesar 1 %;
- b. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 %;
- c. Meningkatnya skor PPH pada tahun 2013 menjadi 91,5;
- d. Stabilitasnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya, sesuai HPP;
- e. Stabilitasnya harga beras di tingkat konsumen, dengan *Coefficient Variant* (CV) < 10 persen.

## **B. PENETAPAN KINERJA**

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013, sebagai berikut :

**Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013**

Unit Organisasi Eselon I : Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran : 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun	1 %
		2. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan	91,5 %
		3. Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun	1,5 %
		4. Stabilitasnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya	Sesuai HPP
		5. Stabilitasnya harga beras di tingkat konsumen	CV < 10 %

**Jumlah Anggaran :  
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :  
Rp. 692.070.000.000,00**

Indikator kinerja pada Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 mengalami perubahan dari PK Tahun 2012. Perubahan tersebut sesuai dengan Permenpan dan RB No 29 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa target untuk tingkat eselon I berupa outcome, serta perubahan arah kebijakan dari Kementerian Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2013, sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat BKP, yaitu meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, dengan sasaran kegiatan utama yaitu: (1) Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (2) Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan; (3) Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan; (4) Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. Sementara itu, sasaran kegiatan Dewan Ketahanan Pangan adalah meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan; dan sasaran SOLID adalah meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga. Masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam **tabel 2** berikut :

**Tabel 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun	1 %	naik 3,81 %	Jumlah Penduduk Pawan Pangan : Th. 2012 = 80,58 juta Th. 2013 = 83,65 juta
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,5	81,4	
		3. Penurunan konsumsi beras per tahun	1,5 %	turun 0,3 %	Konsumsi Beras : Th. 2012 = 96,59 Kg/Kap/th Th. 2013 = 96,32 Kg/Kap/Th
		4. Stabilitasnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya	Sesuai HPP	Rp. 4.000	HPP tingkat petani 2013 sebesar Rp. 3.000
		5. Stabilitasnya harga beras di tingkat konsumen	CV < 10 %	1,31 dan 1,21	CV Harga Beras Umum sebesar 1,31, dan CV Harga Beras Termurah 1,21

Sumber data, diolah 5BKP Kementerian Pertanian.

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan unit kerja Eselon II yaitu Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan Sistem Monitoring Evaluasi (Simonev) dan PMK 249/2011 secara *online*, Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAI), serta Laporan Kegiatan Utama dan Strategis.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliabel sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target

kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :

### B.1. Penurunan Penduduk Rawan Pangan

Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) Kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) Jangka waktu/periode kejadian dengan kategori *kronis* untuk jangka panjang dan *transien* untuk jangka pendek/fluktuasi. Selain itu kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat pengangguran, karena terkait dengan pendapatan penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli masyarakat. Berdasarkan **tabel 3** dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran sejak tahun 2009 – 2013 cenderung turun.

**Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Tahun 2009 – 2013**

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013	Pertumbuhan (%/Tahun)
1. Jumlah penduduk (juta jiwa)	231,4	237,6	241	245	247,39	1,35
2. Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	32,53	31,02	30,02	29,13	28,55	(2,56)
3. Persentase Penduduk Miskin	14,15	13,33	12,49	11,96	11,47	(4,09)
4. Jumlah Pengangguran terbuka (juta jiwa)	7,87	8,59	8,12	7,61		

Sumber: Statistik Indonesia, Berita Resmi Statistik, Press Release, dan Buletin dari BPS pada berbagai tahun; diolah Badan BKP Kementerian Pertanian.

Berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2009 - 2013, bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Jumlah penduduk miskin tersebut selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata 4,09 persen pertahun, dimana penurunan jumlah penduduk miskin perkotaan lebih besar



dibanding perdesaan, yaitu di perkotaan turun 4,44 persen dan di perdesaan turun sebesar 3,61 persen pertahun.

Penurunan penduduk miskin di perkotaan, tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,81 juta jiwa atau 0,85 persen dan 2011 sebesar 0,15 juta jiwa atau 0,78 persen, sedangkan tahun selanjutnya kurang dari 0,35 persen. Sementara itu penurunan penduduk miskin di perdesaan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,69 juta jiwa atau 16,54 persen dan tahun berikutnya kurang dari 10 persen seperti tertera pada **Tabel 4**.

**Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2009–2013**

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013	Pertumbuhan (%/Tahun)
1. Perkotaan						
a. Juta Jiwa	11,91	11,10	10,95	10,65	10,63	(2,22)
b. Persen	10,72	9,87	9,09	8,78	8,52	(4,44)
2. Perdesaan						
a. Juta Jiwa	20,62	19,93	18,94	18,48	17,91	(2,77)
b. Persen	17,35	16,56	15,59	15,12	14,42	(3,61)
3. Jumlah						
a. Juta Jiwa	32,53	31,02	29,89	29,13	28,55	(2,56)
b. Persen	14,06	13,06	12,36	11,96	11,47	(4,09)

Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai AKG 2.000. Jika konsumsi perkapita: kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; sekitar 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk katagori tahan pangan.

Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup banyak, terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Jumlah penduduk : **(a) Sangat rawan pangan** pada tahun 2009 sekitar 33,29 juta atau 14,47 persen, bertambah menjadi 35,71 juta atau 15,34 persen pada tahun 2010, pada tahun 2011 bertambah menjadi 42,08 juta atau 17,41 persen, tahun 2012 bertambah menjadi 47,65 juta atau 19,46 persen, dan pada tahun 2013 (Triwulan I) berkurang menjadi 47,02 juta atau 19,04 persen; **(b) Rawan pangan** pada tahun 2009 mencapai 61,57 juta atau 27,46 persen, bertambah menjadi 72,44 juta atau 31,12 persen pada tahun

2010, bertambah lagi menjadi 78,48 juta atau 32,48 persen pada tahun 2011, tahun 2012 bertambah menjadi 80,58 juta atau 32,91 persen, dan pada tahun 2013 (Triwulan I) bertambah menjadi 83,65 juta atau 33,87 persen; serta **(c) Tahan pangan** pada tahun 2009 sebanyak 123,96 juta atau 53,90 persen, bertambah menjadi 124,61 juta atau 53,53 persen pada tahun 2010, tetapi pada tahun 2011 berkurang menjadi 121,01 juta atau 50,10 persen; pada tahun 2012 berkurang menjadi 116,61 juta atau 47,63 persen, dan pada tahun 2013 (Triwulan I) berkurang menjadi 116,31 juta atau 47,09 persen. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan.

Kalau dibandingkan antara jumlah penduduk miskin dan penduduk rawan pangan dari data tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, menunjukkan terdapat *trend* yang berbanding terbalik. Dari tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Sementara itu, penduduk rawan pangan justru mengalami peningkatan pada tahun 2009-2012, sedangkan pada 2013 (Triwulan I) mengalami penurunan. Namun demikian hal ini perlu mendapat penjelasan secara lebih mendalam dan tindak lanjut yang lebih serius. Kenaikan tersebut disebabkan oleh : pendapatan masyarakat dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum masih rendah, pola konsumsi pangan yang tidak seimbang, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, adanya bencana alam, serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan belum seimbang. Terkait dengan teknis kegiatan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penanganan rawan pangan adalah : (a) pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti; (b) belum terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; dan (c) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti yang mempengaruhi kemampuan dalam penanganan rawan pangan.

Program dan kegiatan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan penurunan penduduk rawan pangan yaitu penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan. Kedua kegiatan tersebut secara nasional belum mampu memberikan dampak secara signifikan karena target kegiatan analisis penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2013 sebanyak 455 lokasi 33 provinsi dan 1 pusat. Sementara itu, kegiatan pengembangan desa mandiri pangan pada tahun 2013 difokuskan pada pembinaan,

karena terjadi perubahan kebijakan di lingkup Kementerian Pertanian yaitu optimalisasi kegiatan diversifikasi pangan dalam mendukung swasembada beras 10 juta ton tahun 2014, sehingga kegiatan pengembangan desa mandiri pangan terkena moratorium dan difokuskan pada kawasan mandiri pangan di daerah perbatasan sebanyak 121 kawasan.

Kondisi tersebut turut mendukung adanya pergeseran dari jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan, seperti tertera pada **Tabel 5**.

**Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2009 – 2013**

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013 (TW I)	Pertumbuhan (%/Tahun)
1. Jumlah penduduk (Juta Jiwa)	231,4	237,6	241	245	247,39	1,30
2. Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	32,53	31,02	30,02	29,13	28,55	- 4,09
3. Jumlah Penduduk Sangat Rawan <sup>a)</sup> :						
a. Jumlah (juta Jiwa)	33,29	35,71	42,08	47,65	47,02	5,96
b. Persentase	14,47	15,34	17,41	19,46	19,04	4,81
4. Jumlah Penduduk Rawan <sup>b)</sup> :						
a. Jumlah (juta Jiwa)	72,72	72,44	78,48	80,58	83,65	3,23
b. Persentase	31,62	31,12	32,48	32,91	33,87	2,12
5. Jumlah Penduduk Tahan Pangan <sup>c)</sup> :						
a. Jumlah (juta Jiwa)	123,96	124,61	121,01	116,61	116,31	-1,95
b. Persentase	53,9	53,53	50,10	47,63	47,09	-3,03

Sumber data: BPS tahun 2008-2011, diolah BKP Kementerian Pertanian.

Catatan: (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG;

(b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG;

(c) Konsumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG.

Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan BKP adalah Desa dan Kawasan Mandiri Pangan. Selain kegiatan pendampingan masyarakat oleh tenaga pendamping, juga dialokasikan dana bansos yang digunakan dalam rangka pengembangan ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2009 disediakan dana sebanyak Rp. 35,9 Milyar dan meningkat menjadi Rp. 191,430 Milyar pada tahun 2013 atau mengalami rata-rata penambahan sebesar Rp. 38,826 Milyar per tahun (**Tabel 6**).

**Tabel 6. Perkembangan Dana dan RTM Desa Mapan di Indonesia, 2006-2012**

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata/tahun
Bansos (juta)	35.900	86.150	126.730	169.630	191.430	38.826
RTM (KK)	148.000	235.625	331.375	369.750	376.290	75.258

Sumber : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Sasaran kegiatan Desa dan Kawasan Mapan adalah rumah tangga miskin di desa rawan pangan. Pada tahun 2009 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima manfaat sebanyak 148.000 KK dan setiap tahunnya RTM yang ditangani dalam program Demapan ini mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012, jumlah penerima manfaat dari program ini sebanyak 369.750 KK. Pada tahun 2013, kegiatan Desa Mandiri Pangan dikembangkan dalam 2 (dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa mapan Reguler yang merupakan kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada, dan (2) Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 121 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 desa per kawasan, namun pada pertengahan tahun terjadi penghematan BBM sehingga sasarannya berubah menjadi 109 kawasan atau jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 6.540 KK. Dengan demikian sampai tahun 2013, jumlah RTM yang sudah diberdayakan melalui kegiatan ini sebanyak 376.290 KK atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 75.258 KK/tahun.

Beberapa usaha yang sudah dijalankan adalah pengadaan saprodi, dagang hasil bumi, simpan pinjam, pembuatan produk turunan pertanian, penggemukan ternak dan masih banyak lagi usaha yang bertujuan sebagai sumber pendapatan anggota kelompok. Sumber penghasilan ini dipergunakan sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

## **B.2. Skor Pola Pangan Harapan**

Selama periode 2009 - 2013, perkembangan agregat konsumsi pangan mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat sampai tahun 2011, kemudian menurun hingga 2013. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah Badan Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa konsumsi energi penduduk Indonesia pada tahun 2009 – 2013 mengalami sedikit peningkatan rata-rata sebesar 0,1 persen per tahun. Sejalan dengan itu, konsumsi protein juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,7 persen pertahun seperti dalam **Tabel 7**.

Konsumsi energi perkapita perhari pada tahun 2009 mencapai 1.927 kkal/kap/hari meningkat menjadi 2.025 kkal/kap/hari tahun 2010 dan menjadi 2.048 kkal/kap/hari tahun 2011. Konsumsi energi tersebut mengalami sedikit penurunan dari 1.944 kkal/kapita/hari pada tahun 2012 menjadi 1.930 kkal/kap/hari pada tahun 2013, dimana konsumsi energi tahun 2013 ini sudah mencapai 96,5% AKE (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG VIII tahun 2004). Sementara itu, konsumsi protein selama kurun waktu 2009-2013 sudah melebihi angka kecukupan protein yang direkomendasikan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram perkapita perhari.

Pada tahun 2013, dengan mempertimbangkan peningkatan pengeluaran untuk konsumsi, maka dilakukan penyesuaian untuk penghitungan angka skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan menggunakan koreksi Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2009). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, dari sisi kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2009-2013 secara umum telah terjadi peningkatan dari 75,7 tahun 2009 menjadi 81,4 tahun 2013.

**Tabel 7. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 2009 – 2013**

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	1.927	2.025	2.048	1.944	1.930
Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	54,3	57,9	59,1	55,9	55,7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,7	85,7	85,6	83,5	81,4

Sumber data : Susenas BPS, diolah BKP Kementan

Dari sisi komposisi, keragaman konsumsi kelompok pangan masih didominasi kelompok pangan bersumber dari padi-padian, melebihi konsumsi ideal sebesar 50 persen. Konsumsi umbi-umbian baru tercatat sebesar 2-3 persen, belum mencapai proporsi ideal sebesar 6 persen, seperti dalam **Tabel 8** di bawah ini.

**Tabel 8. Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2011-2013**

Kelompok Pangan	2011		2012		2013		Anjuran	
	Energi	% AKG	Energi	%AKG	Energi	%AKG	Energi	% AKG
a. Padi-padian	1.223	61,2	1.155	57,7	1164	58,2	1.000	50,0
b. Umbi-umbian	54	2,7	41	2,0	39	1,9	120	6,0
c. Pangan hewani	186	9,3	183	9,1	174	8,7	240	12,0
d. Minyak dan lemak	232	11,6	241	12,1	233	11,6	200	10,0
e. Buah/biji berminyak	47	2,4	43	2,1	39	1,9	60	3,0
f. Kacang-kacangan	61	3,0	59	2,9	58	2,9	100	5,0
g. Gula	105	5,2	91	4,5	93	4,7	100	5,0
h. Sayur dan buah	104	5,2	100	5,0	96	4,8	120	6,0
i. Lain-lain	36	1,8	32	1,6	35	1,8	60	3,0
<b>Total</b>	2.048	102,4	1.944	97,2	1.930	96,5	2.000	100
<b>Skor PPH</b>	<b>85,6</b>		<b>83,5</b>		<b>81,4</b>		<b>100</b>	

Sumber data : Susenas BPS 2011 – 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian

Secara nasional, kualitas/keragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor PPH mengalami penurunan dari 85,6 pada tahun 2011 menjadi 83,5 pada tahun 2012 dan 81,4 pada tahun 2013. Oleh karena itu, untuk terwujudnya konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal (B2SAH), diperlukan upaya: 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yaitu penyusunan alat peraga bagi kelompok wanita dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) Penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

### B.3. Penurunan Konsumsi Beras

Secara kuantitas perkembangan konsumsi pangan nasional selama tahun 2012-2013 seperti tertera pada **Tabel 9**. Pada tahun 2013, konsumsi beras langsung dalam rumah tangga tercatat sebesar 96,3 kg/kapita/tahun, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 (96,6 kg/kapita/tahun) maka terjadi penurunan sebesar 0,3 % dari target penurunan sebesar 1,5% per tahun. Penurunan konsumsi beras tahun 2013

dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi makanan jadi asal beras di luar rumah seperti restoran, cafe, dan lain-lain. Namun demikian laju rata-rata penurunan konsumsi beras selama tahun 2009-2013 sudah menunjukkan pencapaian yang cukup baik yaitu tercatat sebesar 1,49% per tahun atau 93,6% dari target 1,5%.

**Tabel 9. Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2011 – 2013**

Kelompok Pangan	Konsumsi Pangan					
	gram/kap/hari			kg/kap/tahun		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
<b>I. Padi-padian</b>						
a. Beras	278,70	264,63	263,88	101,73	96,59	96,32
b. Jagung	4,26	5,14	4,47	1,55	1,88	1,63
c. Terigu	29,61	26,95	27,68	10,81	9,84	10,10
<b>II. Umbi-umbian</b>						
a. Singkong	28,33	20,56	18,57	10,34	7,50	6,78
b. Ubi jalar	8,33	6,77	6,87	3,04	2,47	2,51
c. Kentang	4,43	4,13	4,45	1,62	1,51	1,62
d. Sagu	1,36	1,23	1,23	0,50	0,45	0,45
e. Umbi lainnya	1,89	1,25	1,15	0,69	0,46	0,42
<b>III. Pangan Hewani</b>						
a. Daging ruminansia	6,15	8,47	4,94	2,24	3,09	1,80
b. Daging unggas	14,45	13,36	13,80	5,28	4,88	5,04
c. Telur	21,71	21,26	19,96	7,92	7,76	7,28
d. Susu	6,37	5,13	6,37	2,32	1,87	2,32
e. Ikan	57,68	53,55	53,42	21,05	19,55	19,50
<b>IV. Minyak dan Lemak</b>						
a. Minyak kelapa	4,67	3,20	3,32	1,71	1,17	1,21
b. Minyak sawit	20,55	23,30	22,16	7,50	8,50	8,09
c. Minyak lainnya	0,64	0,38	0,48	0,23	0,14	0,17
<b>V. Buah/biji berminyak</b>						
a. Kelapa	7,37	6,84	6,01	2,69	2,50	2,19
b. Kemiri	1,28	1,01	1,08	0,47	0,37	0,39
<b>VI. Kacang-kacangan</b>						
a. Kedelai	22,66	21,24	21,34	8,27	7,75	7,79
b. Kacang tanah	1,00	0,85	0,88	0,37	0,31	0,32
c. Kacang hijau	0,85	0,82	0,78	0,31	0,30	0,28
d. Kacang lain	0,31	0,68	0,30	0,11	0,25	0,11
<b>VII. Gula</b>						
a. Gula pasir	26,18	22,97	23,57	9,55	8,38	8,60
b. Gula merah	2,56	1,88	1,93	0,93	0,69	0,71
<b>VIII. Sayuran dan buah</b>						
a. Sayur	167,48	162,83	155,99	61,13	59,43	56,94
b. Buah	79,68	86,62	82,87	29,08	31,62	30,25

Kelompok Pangan	Konsumsi Pangan					
	gram/kap/hari			kg/kap/tahun		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
<b>IX. Lain-lain</b>						
a. Minuman	45,88	45,66	47,59	16,75	16,66	17,37
b. Bumbu-bumbuan	10,42	9,87	9,60	3,80	3,60	3,50

Sumber data : Susenas BPS 2011 – 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian

Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, maka konsumsi pangan masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah; melalui kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam bentuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta Sosialisasi dan Promosi P2KP.

. Meskipun tren konsumsi beras mengalami penurunan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat akan tetap tinggi, sehingga diharapkan pola konsumsi pangan masyarakat dapat mengarah pada pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang, masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu, belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga, serta lemahnya partisipasi masyarakat

Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras dengan meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara lain : (a) Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) Keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan) belum mampu memproduksi menurut skala ekonomi, sehingga harga pangan karbohidrat bersumber dari pangan lokal masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) Teknologi penyimpanan pangan



lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat.

Penurunan konsumsi beras merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan telah mengalokasikan kegiatan: (a) Pemberdayaan kelompok wanita dengan jumlah kelompok wanita P2KP sebanyak 6.000 desa tahun 2012 dan 6.150 desa tahun 2013, melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), sebanyak 9 provinsi dan 10 kab/kota, yang mendukung pangkin dan pengembangan teknologi pangolahan pangan lokal; (c) Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sejak usia dini pada SD/MI; dan (d) Sosialisasi dan Promosi.

Kedepan penurunan konsumsi beras perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah dan sayur. Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, terutama karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama usaha kelompok. Kegiatan promosi untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan sudah menunjukkan pengaruh langsung terhadap penurunan konsumsi beras, hal ini sudah dapat dilihat dari perilaku konsumsi pangannya yang sudah beragam.

Dalam mendukung pencapaian target percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, perlu diperhatikan aspek keamanan pangan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

Dalam aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut, yaitu: (a) ketidakamanan pangan yang disebabkan adanya residu pestisida pada berbagai jenis hasil pertanian terutama pada sayuran, buah,

dan pangan segar lainnya; (b) perilaku produsen pangan segar yang menggunakan zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemanis buatan yang tidak sesuai ketentuan; serta (c) perilaku konsumen yang sebagian besar masih belum mengonsumsi pangan yang aman. Tiga hal tersebut dapat menimbulkan keracunan pada makanan, bahkan dapat menjadi salah satu penyebab Penyakit Bawaan Makanan/PBM (*food borne diseases*) bagi konsumen, karena: cemaran racun kimia atau toxin, logam berat, dan bahan kimia lainnya, serta cemaran mikroba dari bakteri, jamur, parasit, dan virus.

Kasus keracunan pangan yang melanda masyarakat, biasanya disebabkan oleh kontaminasi pada berbagai jenis pangan segar diantaranya oleh: (a) bahan kimia berupa residu pestisida (biasanya digunakan untuk pemberantasan hama dan penyakit dan sebagian masih tertinggal pada tanaman yang melebihi ambang batas yang ditetapkan untuk kesehatan manusia), residu obat hewan, logam berat (Hg, Pb, dan Cd), *aflatoxin*, bahan tambahan pangan yang berlebihan dan berbahaya; (b) cemaran biologis yang berasal dari mikroba bakteri, kapang, *khamir*, *protozoa*, dan *virus*.

Dalam rangka peningkatan penanganan keamanan pangan segar, Badan Ketahanan Pangan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah: (a) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar; (b) Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan (c) Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar baik di pusat maupun daerah (provinsi atau kab/kota).

#### **B.4. Stabilisasi Harga**

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilitasnya harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan. Berikut perkembangan rata-rata harga pangan nasional per komoditi tahun 2013 dapat dilihat pada **tabel 10** di bawah ini.

**Tabel 10. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2013**

No	Komoditas	Rerata (Rp/kg)	CV (%)	Max	Min
1	Beras Umum	10.854	1,33	11.076	10.646
2	Beras Termurah	8.585	1,15	8.739	8.429
3	Daging Ayam	29.824	9,40	34.782	26.800
4	Daging Sapi	92.796	2,50	97.401	89.495
5	Gula Pasir	11.874	1,08	11.964	11.500
6	Cabe Merah	33.768	19,62	43.965	25.556
7	Cabe Rawit	31.103	27,14	49.113	22.472
8	Bawang Merah	36.293	32,08	55.881	20.881
9	Bawang Putih	21.676	40,49	43.434	14.416
10	Kedelai	9.604	5,52	10.464	9.160
11	Migor Curah	13.233	5,23	14.727	12.649
12	Migor Kemasan	12.859	0,75	13.002	12.719
13	Telur Ayam	17.675	6,81	19.746	16.172

Sumber : Data BPS diolah oleh BKP, kecuali jagung dari Kemendag. \*) Data s.d. akhir Desember 2013

Berdasarkan data di atas, perkembangan harga komoditas pangan selama tahun 2013, terjadi kenaikan harga realif kecil pada komoditi seperti beras, jagung, daging sapi, daging ayam dan telur. Kenaikan harga tertinggi terdapat pada 4 komoditas yang mengalami gejolak harga (CV >10%), yaitu cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih. Sementara untuk harga komoditas yang mengalami penurunan harga seperti gula dan bawang putih.

Khusus untuk harga beras selama periode 2009 – 2013 kondisinya lebih stabil dengan capaian Indikator *Coefisien Varian* (CV) sebesar 3,35, seperti pada **tabel 11** dibawah ini.

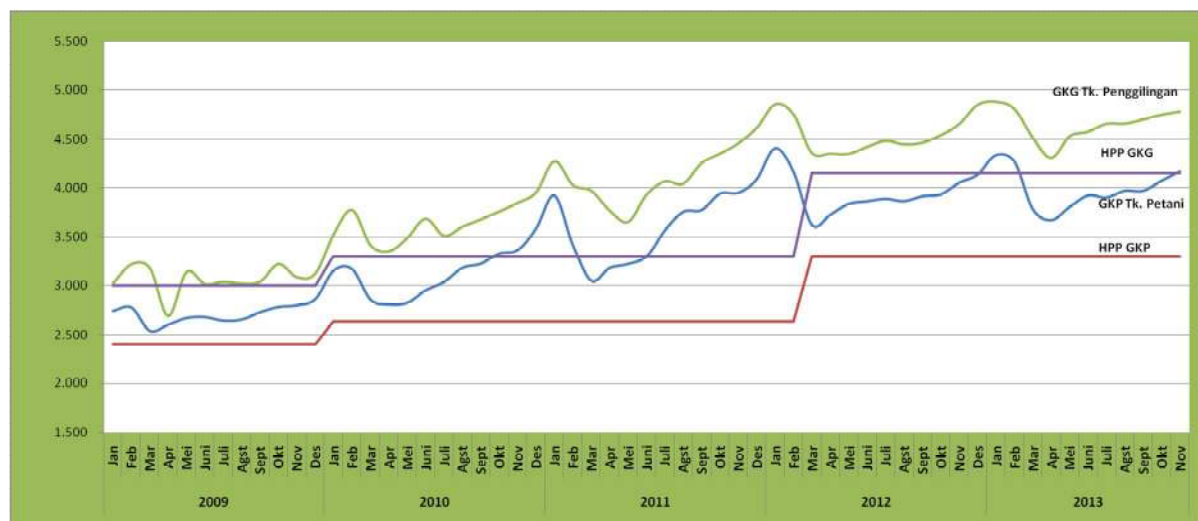
**Tabel 11. Capaian Indikator Coefisien Varian (CV) Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Coefisien Varian (CV) Komoditi Beras	
	Umum (%)	Termurah (%)
2009	1,29	0,96
2010	7,22	8,57
2011	5,83	6,76
2012	1,09	1,06
2013	3,21	3,23

Keterangan : Data Desember 2013 masih angka sementara,

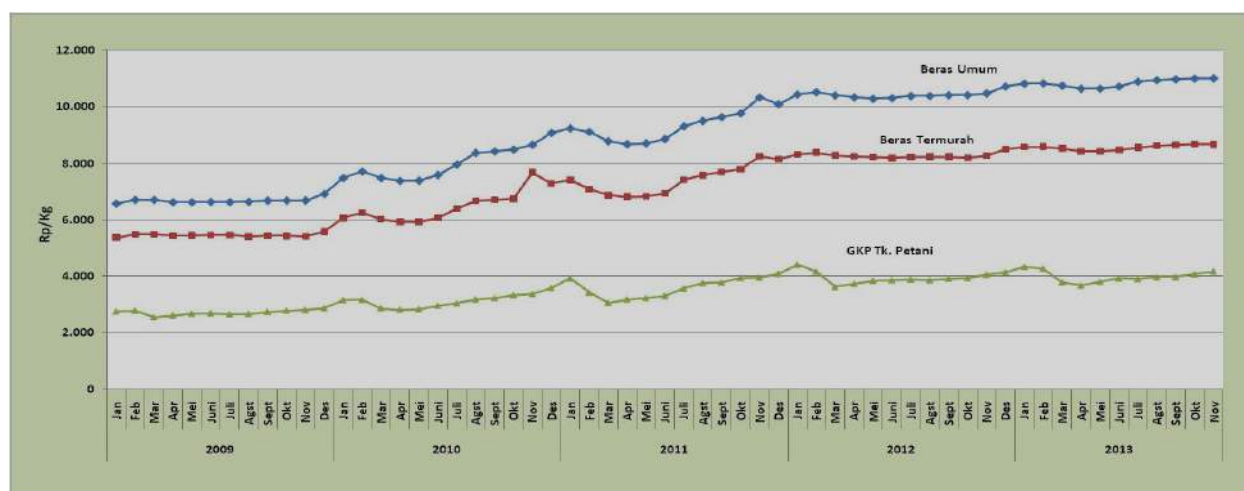
- Sumber : BPS, diolah BKP

Perkembangan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bila dilihat berdasarkan **grafik 1** di bawah, harga GKP dan GKG pada November-Januari pada setiap tahunnya cenderung naik karena sedang musim tanam (paceklik).



**Grafik 1. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani dan GKG di Tingkat Penggilingan Tahun 2009 – 2013**

Sementara itu, bila dilihat dari **grafik 2** perkembangan harga GKP di tingkat Petani dan beras eceran selama 5 tahun terakhir, pola pergerakan harga beras lebih besar (0,91%) daripada harga GKP (0,84%), sedangkan harga beras periode November s.d. Januari cenderung naik.



**Grafik 2. Perkembangan Harga GKP Tk. Petani dan Beras Eceran Th. 2009-2013**

Sumber : BPS, diolah BKP

Dalam mendukung stabilisasi harga tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani/kelompoktani/Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik. Melalui kegiatan Penguatan-LDPM yang dilaksanakan sejak tahun 2009, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan kelembagaan Gapoktan agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik.

Dukungan dana Bansos yang bersumber dari APBN pada kegiatan Penguatan-LDPM hanya diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya menerima pembinaan dan/atau bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi. Sasaran Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 1.265 gapoktan tetapi gapoktan yang sudah melaksanakan sebanyak 1.248 gapoktan atau sebesar 98.66 %.

Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2009 – 2013 pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM seperti diilustrasikan pada **tabel 12** :

**Tabel 12. Perkembangan Pelaksanaan Penguatan-LDPM periode 2009-2013**

Tahapan	Jumlah Gapoktan					Total
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
Penumbuhan	546	204	235	281	75	1341
Pengembangan		545	237	235	281	1266
Kemandirian			512	220	235	1017
Pasca kemandirian				512	220	732
Total	546	749	984	1248	811	

Keterangan :

Badan Ketahanan Pangan tidak lagi mendukung pendanaan APBN untuk pembinaan tahap Pasca Kemandirian, selanjutnya dibina oleh provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD

Tahun 2012, merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, dimana pada tahun keempat ditumbuhkan sebanyak 281 Gapoktan, 235 Gapoktan yang masuk ke tahap Pengembangan, 220 Gapoktan yang masuk ke tahap Kemandirian dan 512 Gapoktan yang masuk Tahap Kemandirian. Gapoktan yang masuk pada Tahap Penumbuhan akan menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan akan menerima dana bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos namun provinsi dan kabupaten/kota tetap melakukan pembinaan agar dana bansos yang diterima pada tahun pertama dan kedua tetap dikelola dengan baik oleh Gapoktan sebagai modal usaha yang berkembang secara berkelanjutan. Pada akhir tahun 2012 dari 235 Gapoktan setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 224 Gapoktan yang layak untuk masuk tahap Pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta, dan selanjutnya dana bansos yang telah dialokasi bagi 11 Gapoktan dikembalikan ke kantor Kas Negara.

Tahun 2013, target awal sebanyak 356 terdiri dari 75 tahap penumbuhan dan 281 tahap pengembangan setelah ada kebijakan penghematan sasaran berubah yaitu ditumbuhkan sebanyak 300 Gapoktan terdiri dari: 75 Gapoktan tahap Penumbuhan, dan 225 Gapoktan yang masuk ke tahap Pengembangan. Gapoktan yang masuk

pada Tahap Penumbuhan akan menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan akan menerima dana bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos namun provinsi dan kabupaten/kota tetap melakukan pembinaan agar dana bansos yang diterima pada tahun pertama dan kedua tetap dikelola dengan baik oleh Gapoktan sebagai modal usaha yang berkembang secara berkelanjutan. Pada akhir tahun 2013 dari 300 Gapoktan setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 74 Gapoktan yang layak masuk tahap Penumbuhan dan dapat menerima bansos sebesar Rp. 150 juta/gapoktan; sedangkan 219 Gapoktan yang layak untuk masuk tahap Pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta, dan selanjutnya dana bansos yang tidak dimanfaatkan dikembalikan ke kantor Kas Negara.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang di biayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui DAK Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos.

Pada tahun 2012, Tahap Penumbuhan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Provinsi Papua 7 kelompok dan Papua Barat 2 kelompok, dengan alokasi dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 40 juta untuk pembangunan lumbung. Tahap Pengembangan dilaksanakan di 31 provinsi yang dialokasikan dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 20 juta kepada kelompok lumbung pangan yang telah mendapatkan bantuan pembangunan fisik lumbung melalui DAK Tahun 2010 dan 2011 sebanyak 613 kelompok. Dana Bansos tersebut dipergunakan untuk pengisian cadangan pangan. Sedangkan Tahap Kemandirian dilaksanakan di 31 provinsi dialokasikan dana Bansos sebesar Rp. 20 juta untuk penguatan usaha kelompok. Kelompok lumbung pangan yang masuk tahap kemandirian adalah kelompok yang telah mendapatkan dana Bansos untuk pengisian cadangan pangan pada tahun 2010 dan telah terseleksi serta dinyatakan layak masuk tahap kemandirian. Sasaran Tahap Kemandirian sebanyak 418 kelompok.

Pada tahun 2013, mekanisme pengelolaan anggaran dan kegiatan masih sama dengan tahun 2012, dimana Tahap Pengembangan dilaksanakan di 29 provinsi dengan lokasi dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 20 juta bagi kelompok lumbung pangan yang telah mendapatkan bantuan pembangunan fisik lumbung melalui DAK Tahun 2011 dan 2012. Dana Bansos tersebut dipergunakan untuk pengisian cadangan pangan. Sedangkan Tahap Kemandirian dilaksanakan di 29 provinsi dengan lokasi dana Bansos sebesar Rp. 20 juta untuk penguatan usaha kelompok. Kelompok lumbung pangan yang masuk tahap kemandirian adalah kelompok yang telah mendapatkan dana Bansos untuk pengisian cadangan pangan pada tahun 2011 dan berdasarkan hasil seleksi dinyatakan layak masuk tahap kemandirian. Badan Ketahanan Pangan mengalokasikan dana Bansos kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat sebanyak 872 kelompok lumbung yang terdiri dari tahap pengembangan 619 kelompok dan tahap kemandirian 253 kelompok. Pada awalnya, target sasaran kegiatan ini sebanyak 878 kelompok, namun karena ada 4 kelompok lumbung pangan di Provinsi NTB yang dinyatakan tidak layak, maka alokasi bansos untuk kelompok tersebut digunakan penghematan BBM Tahun 2013.

Alokasi sasaran fisik kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada **tabel 13** dibawah ini.

**Tabel 13. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2009 – 2013**

Tahapan	Jumlah Lumbung Pangan				
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Penumbuhan	279	690	682	9	
Pengembangan		276	425	620	253
Kemandirian			375	408	619
Total	279				

Sementara itu, target dan realisasi kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat per provinsi tahun 2013 dapat dilihat pada **Tabel 14 dan Tabel 15**. Realisasi kegiatan pengembangan lumbung pangan yang mencapai 100 persen terdapat di 24 provinsi, sedangkan yang kurang dari 100 persen di 7 provinsi.



**Tabel 14. Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan LPM per Provinsi Tahun 2013**

No	Provinsi	Rencana Alokasi Jumlah Lumbung			SP2D			Presentase
		Pengembangan	Kemandirian	Jumlah	Pengembangan	Kemandirian	Jumlah	
1	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
2	Banten	1	12	13	1	12	13	100
3	Jawa Barat	1	25	26	1	25	26	100
4	Jawa Tengah	40	71	111	40	71	111	100
5	DIY	0	10	10	0	10	10	100
6	Jawa Timur	68	62	130	65	62	127	97,69
7	Aceh	12	13	25	12	13	25	100
8	Sumatera Utara	13	14	27	13	14	27	100,00
9	Sumatera Barat	7	22	29	7	18	25	86,21
10	Riau	0	1	1		1	1	100
11	Jambi	8	8	16	6	8	14	87,5
12	Sumatera Selatan	20	37	57	20	37	57	100
13	Bengkulu	7	6	13	7	6	13	100
14	Lampung	11	53	64	11	53	64	100
15	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
16	Kepulauan Riau	0	1	1		1	1	100
17	Kalimantan Barat	10	15	25	10	12	22	88
18	Kalimantan Tengah	0	22	22		22	22	100
19	Kalimantan Selatan	0	24	24	0	23	23	95,83
20	Kalimantan Timur	0	3	3	0	3	3	100
21	Sulawesi Utara	6	24	30	5	24	29	96,67
22	Sulawesi Tengah	14	20	34	14	20	34	100
23	Sulawesi Selatan	4	25	29	4	25	29	100
24	Sulawesi Tenggara	1	18	19	1	18	19	100
25	Gorontalo	0	11	11	0	11	11	100
26	Sulawesi Barat	0	2	2	0	2	2	100
27	Bali	0	11	11	0	11	11	100
28	N T B	6	42	48	5	39	44	91,67
29	N T T	8	52	60	8	52	60	100
30	Maluku	3	6	9	4	5	9	100,00
31	Maluku Utara	4	5	9	5	4	9	100
32	Papua Barat	2	1	3	2	1	3	100
33	Papua	7	3	10	7	3	10	100
<b>Total</b>		<b>253</b>	<b>619</b>	<b>872</b>	<b>248</b>	<b>606</b>	<b>854</b>	<b>97,94</b>

Pencairan dana Bansos kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dari sasaran sebesar Rp. 17,44 milyar untuk 872 kelompok, s.d 5 Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp. 17,08 Milyar atau 854 kelompok (97,94 %) yang terdiri dari Tahap Pengembangan sebesar Rp. 4,97 milyar atau 248 kelompok (29,10 %), dan Tahap Kemandirian sebesar Rp. 12,12 milyar atau 606 kelompok ( 70,96 %)

Provinsi yang tidak merealisasi kegiatan pengembangan lumbung pangan secara penuh terjadi di 7 provinsi, sebanyak 18 kelompok seperti pada **tabel 15** dibawah ini :

**Tabel 15. Provinsi yang tidak realisasi bansos penuh**

No	Provinsi	Kabupaten	Tahap	Jml Kel. Tidak Merealisasikan	Keterangan
1	Jawa Timur	Bangkalan	Pengembangan	1	Lumbung yang dibangun telah beralih fungsi menjadi pabrik tahu, took bangunan dan poldes.
		Lumajang	Pengembangan	1	
		Magetan	Pengembangan	1	
2	Sumatera Barat	Padang	Kemandirian	1	Hasil evaluasi kelompok dinyatakan tidak layak masuk tahap kemandirian
		Pariaman			
		Solok	Kemandirian	1	
		Pesisir Selatan	Kemandirian	1	
3	Jambi	Muaro Jambi	Pengembangan	2	Lumbung yang dibangun jauh dari pemukiman penduduk dan dibangun dilokasi rentan banjir
4	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Kemandirian	3	Lumbung dinyatakan tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
5	Kalimantan Selatan	Kota baru	Kemandirian	1	Terjadi sengketa kepengurusan, sehingga kelompok mengundurkan diri dan tidak layak masuk tahap kemandirian
6	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	Pengembangan	1	Tanah tempat dibangun lumbung, belum ada kejelasan surat hibahnya disamping itu juga terjadi sengketa kepengurusan
7	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	Pengembangan	1	Diusulkan pengurangan dana bansos pada saat pemotongan anggaran karena hasil evaluasi kelompok dinyatakan tidak layak masuk tahap kemandirian
			Kemandirian	3	
	<b>TOTAL</b>			<b>18</b>	

Hasil evaluasi Tahap Kemandirian di 3 provinsi terdapat 11 kelompok yang dinilai tidak layak masuk tahap kemandirian (**tabel 15**) yaitu Sumatera Barat (4 kelompok), Kalimantan Barat (1 Kelompok), dan Nusa Tenggara Barat (1 Kelompok).

Data perkembangan kondisi cadangan pangan pemerintah provinsi yang telah dilaporkan oleh 18 provinsi pada periode 2013 dari stock awal dan pengadaan/pembelian sebesar 1.865.563,04 kg beras. Sebagian bahan pangan tersebut disalurkan kepada anggota yang membutuhkan yaitu sebesar 514.437 kg beras, sehingga stock yang ada di pemerintah provinsi pada posisi Januari 2014 adalah sebesar 2.466.476 kg beras. Sedangkan 15 provinsi belum menyampaikan laporan adalah Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

#### **B.5. Capaian Kinerja Lainnya**

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan tugas secara insidental/diluar rencana berdasarkan perintah pimpinan serta kebijakan lainnya yang dianggap penting. Kegiatan tersebut lebih banyak bersifat koordinasi atau dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan instansi terkait baik di dalam maupun luar Kementerian Pertanian; serta di tingkat Internasional yang dikoordinasikan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations World Food Programme (WFP)*, maupun forum lainnya. Beberapa prestasi Badan Ketahanan Pangan, serta apresiasi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan tingkat internasional kepada Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah, seperti :

1. Memperoleh penghargaan internasional dari ***The Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)*** untuk kinerja Badan Ketahanan Pangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, dan disertai pemberian hadiah uang untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar USD 100.000,-
2. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dengan memakai frasa “*One Day No Rice*” ditingkat nasional bergema ke seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menerapkan *one day no rice* atau istilah dan kegiatan yang terkait dengan upaya perubahan pemanfaatan substitusi pangan dari umbi-umbian.

3. Meningkatnya kesadaran pentingnya aspek ketahanan pangan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dari lembaga legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2013 hampir setiap bulan Badan Ketahanan Pangan mendapatkan kunjungan dari DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang ingin mendiskusikan ketahanan pangan, khususnya tentang kebijakan, program dan kegiatan, dan kelembagaan.
4. Melaksanakan kegiatan *Asean Plus Three Emergency Rice Reservec (AFTERR)* berupa hibah bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan, sebagai ketua *APEC-PPFS (Asia-Pacific Economic Cooperation – Policy Partnership on Food Security)* berhasil *mengarahkan forum APEC ini menyusun APEC-Food Security Road Map 2020*.
6. Badan Ketahanan Pangan untuk tahun 2013 mendapatkan penghargaan sebagai Tim Satlak SPI terbaik kedua, serta seluruh Eselon II lingkup BKP mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi.
7. Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2013 berhasil memperoleh kategori “putih” dalam Peta Rawan Korupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dinobatkan menjadi Tokoh Anti Korupsi Kementerian Pertanian Tahun 2013 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Pada TA. 2013 Badan Ketahanan Pangan (BKP) memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 692,070 milyar untuk kegiatan di pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian pada tahun berjalan terjadi penghematan pagu anggaran sebesar Rp. 30,73 milyar untuk subsidi BBM, dan penambahan anggaran untuk Direktif Presiden sebesar Rp. 13,58 milyar, sehingga pagu akhir anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 647,16 milyar.

Seluruh anggaran Tahun 2013 dialokasikan dalam 170 satker berupa : (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp. 75,29 milyar atau 11,63 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi Rp. 392,73 milyar atau 60,68 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp. 179,14 milyar atau 27,68 persen. Untuk kabupaten/kota yang tidak berdiri sendiri/satker mandiri, anggarannya masuk dalam provinsi melalui dana dekonsentrasi.

**Tabel 16. Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2013**

Rp. Milyar

No	Uraian	2013		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat	75,29	60,10	79,82
2	Daerah	571,87	546,01	95,48
	Provinsi	392,73	359,78	95,95
	Kab/Kota	179,14	186,23	94,58
	<b>TOTAL</b>	<b>647,16</b>	<b>606,11</b>	<b>93,66</b>

Alokasi anggaran per kegiatan utama pada tahun 2013 sebelum dan sesudah penghematan adalah sebagai berikut (**tabel 17**):

**Tabel 17. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2013**

(Rp. Juta)

No	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Penghematan
1	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	101.519	88.009	13.510
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	91.436	83.319	8.117
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	353.693	339.638	14.055
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan	145.422	136.194	9.228
	<b>Jumlah</b>	<b>692.070</b>	<b>647.160</b>	<b>44.910</b>

Realisasi Anggaran Pengembangan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2013 mencapai 93,66 persen, realisasi anggaran untuk bantuan sosial mencapai realisasi tertinggi sebesar 99,48 persen dan belanja pegawai mencapai realisasi terendah sebesar 84,45 persen. Realisasi anggaran menurut jenis belanja, seperti pada **tabel 18** :

**Tabel 18. Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA. 2013**

(dalam Rp. Juta)

No	Keterangan	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal			Belanja Bantuan Sosial			Jumlah Anggaran		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	KP	19.842	16.856	84,95	53.033	40.833	76,99	2.420	2.410	99,62	0	0	0,00	75.295	60.099	79,82
2	DEKON	0	0	0,00	161.787	148.027	91,49	0	0	0,00	213.168	211.752	99,34	374.955	359.779	95,95
3	TP	0	0	0,00	77.612	67.976	87,59	10.303	9.525	92,45	108.995	108.732	99,76	196.910	186.233	94,58
	PROP	0	0	0,00	7.628	2.931	38,43	10.140	9.376	92,46	0	0	100,00	17.768	12.307	69,27
	KAB/KOTA	0	0	0,00	69.984	65.045	92,94	163	149	91,61	108.995	108.732	99,76	179.142	173.926	97,09
	TOTAL PUSAT/DK/TP	19.842	16.856	84,95	292.432	256.836	87,83	12.723	11.935	93,81	322.163	320.484	99,48	647.160	606.111	93,66

Belum optimalnya penyerapan anggaran lingkup BKP antara lain disebabkan oleh: (1) Keterlambatan penerbitan SK Pengelola Keuangan baik di provinsi (Gubernur) dan TP (Menteri Pertanian), (2) Adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan sulitnya bagi propinsi untuk melakukan pembinaan atau pengawasan dalam penggunaan dana TP di kabupaten, sehingga terkadang propinsi terkesan lepas tangan dalam hal pembinaan penggunaan anggaran khususnya dana bansos; atau kabupaten/kota beranggapan bahwa tidak perlu ada laporan pertanggung jawaban terhadap provinsi; (3) Pergantian pejabat (kepemimpinan) dan pelaksana kegiatan ketahanan pangan, serta penambahan atau nomenklatur bentuk kelembagaan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran dan terjadinya beberapa revisi anggaran; (4) Pemahaman dan kreativitas petugas administrasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan masih kurang dan sangat tergantung dari arahan pusat; (5) Keterbatasan sarana dan prasarana; (6) banyaknya satker yang ditangani khususnya di tingkat provinsi (kab/kota melalui dana dekontribusi) menyebabkan kesulitan dalam menyusun dan menyampaikan laporan; (6) Adanya perubahan kode MAK di pertengahan tahun yang menyebabkan keterlambatan dalam mencairkan anggaran untuk kegiatan; dan (6) Adanya penghematan di pertengahan tahun anggaran.

#### D. Dukungan Instansi Lain

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional, dipengaruhi pula oleh peran serta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 43 tahun 2009, dimana instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan.

**Tabel 19. Matriks Dukungan Instansi yang Diharapkan**

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan</li> <li>Percepatan penerbitan Inpres Pangkin (Pangan untuk Masyarakat Miskin)</li> </ul>
2	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan</li> <li>Subsidi untuk daerah rawan pangan</li> </ul>
3	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan pusat dan peraturan daerah terkait program diversifikasi pangan</li> <li>Mendukung upaya diversifikasi melalui program Penyediaan Makanan Tambahan – Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis Sumberdaya Lokal</li> </ul>
4	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan penataan kerjasama pemasaran</li> <li>Mendorong sosialisasi/ promosi diversifikasi pangan kepada masyarakat</li> </ul>
5	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah terutama komoditas pertanian dan peternakan</li> <li>Kebijakan pengembangan industry pengolahan pangan</li> </ul>

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
6	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi</li> </ul>
7	Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan</li> </ul>
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi perikanan</li> <li>Kebijakan penetapan score konsumsi ikan</li> <li>Sosialisasi konsumsi ikan</li> <li>Litbang teknologi budidaya dan pengolahan</li> </ul>
9	Kementerian Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha tani menjadi kelembagaan koperasi</li> </ul>
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan cinta pangan lokal dan diversifikasi pangan dalam kurikulum sekolah</li> </ul>
11	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan memasyarakatkan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang</li> <li>Pengawasan produk pangan yang tidak aman dan tidak sehat</li> </ul>
12	Kementerian Riset dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan lahan</li> <li>Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka diversifikasi pangan</li> </ul>
13	Kementerian Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan memasyarakatkan diversifikasi pangan melalui media</li> <li>Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat</li> </ul>
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan peningkatan peran perempuan melalui kelompok wanita tani</li> </ul>
15	B POM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pengawasan produk pangan olahan hasil diversifikasi kelompok tani</li> </ul>
16	BMKG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wacana dan arahan penentuan masa tanam dan jenis tanaman yang cocok di masing-masing daerah</li> </ul>
17	Kementerian Pertanian :	
	a. Ditjen Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi</li> <li>Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu sebagai alternatif sumber karbohidrat</li> </ul>
	b. Ditjen Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan</li> <li>Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buah-buahan</li> </ul>
	c. Ditjen PPHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu</li> </ul>
	d. Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi pangan</li> </ul>



No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
	e. BPSDMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait dengan pola konsumsi yang B2SA</li> <li>• Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH agar masuk dalam buku pintar penyuluhan</li> </ul>
	f. BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan</li> </ul>
	g. BPSBP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura</li> </ul>
	h. BPPTPH (Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola pemanfaatan pekarangan</li> </ul>
	i. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerepan Teknologi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin penepungan, pembuatan mie)</li> </ul>
19	Lembaga	
	a. Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian modal usaha melalui kredit usaha atau pinjaman lunak dengan bunga rendah, khususnya pengolahan pangan lokal non beras dan non terigu</li> </ul>
	b. Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan melalui media cetak/elektronik, <i>event organizer</i>, dan lain-lain</li> </ul>
	c. BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyediaan bahan baku yang mendukung usaha pertanian</li> <li>• membantu promosi diversifikasi pangan</li> </ul>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum**

Pelaksanaan program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2013, secara khusus telah berhasil menimbulkan perubahan di wilayah/kelompok sasaran. Program tersebut berhasil : (a) membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (4.748 Kelompok wanita dan 400 SD/MI); (b) mewujudkan stabilitasi harga gabah/beras, dan jagung di wilayah gapoktan (Penguatan LDPM : Pencapaian target Penumbuhan = 74 gapoktan dan tahap Pengembangan = 219 gapoktan); (c) pemenuhan kebutuhan pangan lingkup kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, yaitu : tahap Pengembangan = 248 kelompok, tahap Kemandirian = 606 kelompok; serta (d) menurunkan KK miskin di Desa Mapan : tahap Persiapan = 429 desa, tahap Penumbuhan = 838 desa, tahap Pengembangan = 829 desa, dan Kemandirian = 359 desa.

Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target adalah stabilisasi harga gabah di tingkat petani dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen telah menunjukkan hasil sesuai dengan target kinerja, indikator lainnya yaitu penurunan penduduk rawan pangan, penurunan konsumsi beras, serta skor PPH belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan/masalah baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD daerah dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

### **B. Hambatan, Kendala dan Upaya Perbaikan**

#### **B.1. Hambatan dan Kendala**

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2013 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih

rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (7) terdapatnya konsep makan “belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah :

- (1) Perubahan nomenklatur dan adanya kebijakan penghematan, menyebabkan keterlambatan revisi dan kekeliruan akun.
- (2) PDRP termasuk dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan & bencana. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa ada kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana, Badan Ketahanan Pangan tidak dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung karena pada tahun 2013 sudah tidak ada kegiatan penyaluran bansos untuk wilayah yang terkena bansos. Sehingga Badan ketahanan Pangan hanya mengoptimalkan Tim SKPG sebagai deteksi dini kejadian kerawanan pangan dan bencana. Namun pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti pada tahun 2013.
- (3) Mutasi Pejabat daerah, sehingga mengalami keterlambatan dalam penetapan Surat Keputusan KPA atau PPK terhadap kegiatan strategis.
- (4) Jarak tempuh lokasi KPPN untuk TP kegiatan Desa Mapan yang di Provinsi sehingga menyulitkan proses pencairan dana apabila terjadi kesalahan,
- (5) Proses pencairan terhadap kab/kota yang menginduk Provinsi terkendala kesalahan pengadministrasian, infrastruktur transportasi.

- (6) Kegiatan fortifikasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan ruang lingkup kegiatan yang belum disetujui ADB.
- (7) *Mindset* petugas tentang keberhasilan kinerja instansi dan program masih seputar realisasi keuangan, sedangkan realisasi fisik masih belum dianggap penting;
- (8) Petugas kegiatan evaluasi yang merangkap dengan kegiatan lain;
- (9) Seringnya terjadi mutasi pejabat/pegawai di daerah;
- (10) Keterlambatan dan kurang berkelanjutan pelaporan evaluasi khususnya laporan fisik kegiatan;
- (11) Belum semua kabupaten/kota yang menggunakan aplikasi Simonev;
- (12) Website ketahanan pangan belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal; dan
- (13) Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

## **B.2. Upaya dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut sebagai berikut:

- (1) BKP Pusat telah menghimbau kepada Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kab/Kota untuk dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan SKPG dan PDRP. Hal ini berkaitan dengan dukungan anggaran, program, dan SDM, sehingga dapat menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan PDRP.
- (2) BKP berupaya memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan nomenklatur dan penghematan kepada daerah.
- (3) Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional,
- (4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal,

- (5) Peningkatan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya,
- (6) Sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung,
- (7) Mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL,
- (8) Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L),
- (9) Perlu upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan.
- (10) Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal,
- (11) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM.
- (12) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.